

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Firdaus, Moh. Syafari. 2017. *Hak Asasi Manusia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Sulawesi Tengah: Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM). Halaman 3
- Qamar, Nurul. 2016. *Hak Asasi dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Recg)*. Jakarta: Sinar Grafia. Halaman 16
- Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (Pasal 1 Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi)

B. JURNAL/WEBSITE

- Abbas, W. (2018). *Comprehensive Migration Governance: Upaya Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi*. 1–6.
- Abdussalam. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Afriandi, F., & Yusnarida Eka Nizmi. (2014). *Kepentingan Indonesia Belum-Meratifikasi Konvensi 1951 dan protokol 1967*. 1–13.
- Armis, T. S. (2021). *Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak*.
- Arsyad, A. (2014). *INTERNALISASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN INKLUSIF PADA ANAK-ANAK PENGUNGS*. 14(1).

- Baperlitbang Kendal. (2012). Diambil dari <https://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak-kha/>
- Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., ...
 ح, ناظمى (2015). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Syria Studies*, 7(1), 37–72.
- Bimrew Sendekie Belay. (2022). No Titleהעינים לנגד שבאמת מה את לראות קשה הכי.
 זאד, (8.5.2017), 2003–2005.
- Bulanan, L. S. (2022). *Total Populasi: 12,847 Individu Laporan Statistik Bulanan September 2022*. (September), 3601–3602.
- Dellyana, S. (2002). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Konvensi protokol*. (n.d.).
- Kusriyati, A. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967. *Law Review*, 12(2), 171–192.
- Majelis Umum PBB. (1948). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of International Law*, 4(1), 133–168.
- Mukadimah. (1989). *Konvensi Hak-Hak Anak* (hal. 1–23). hal. 1–23.
- Rafifnafia Hertianto, M. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM RUANG SIBER DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 555–573.

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3123>

- Rasal, M. A. D. (2019). *PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN FORMAL BAGI PENGUNGSIS ANAK DI KOTA MAKASSAR (Tinjauan Hukum Pengungsi Internasional)*. Universitas Hasanuddin.
- Riyanto, S. (2010). Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 434–449.
- Shalihah, F., & Nur, M. (2021). Observations on the Protection of Refugees in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 361–384.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2143>
- Shalihah, F., & Putri, U. T. (2020). *The Protection of Rights to Education for the Refugee Children During the Covid-19 Pandemic*. 499(September 1990), 427–433. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.322>
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Suparyanto dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Torry Satriyo Kusumo, A. (2012). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(2).
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10642>
- UNHCR. (1951). Konvensi dan Protokol 1951 tentang Pengungsi. *United Nations*, 11.
- Yulianto, R. A. (2016). Penanganan Pengungsi Di Indonesia. In *Veritas* (Vol. 2).

<https://doi.org/10.34005/veritas.v2i1.236>

Zamrodah, Y. (2016). 済無*No Title No Title No Title*. 15(2), 1–23.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PKPA. 2014. Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Halaman 15.